

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa transformasi signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat. Kemajuan ini mendorong munculnya berbagai platform digital yang memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. Pengguna memanfaatkan media sosial sebagai ruang digital untuk memperlihatkan jati diri, menjalin hubungan, melakukan kerja sama, serta mendistribusikan informasi kepada pihak lain [1]. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana interaksi dan hiburan, melainkan juga menjadi ruang publik untuk masyarakat dalam menyampaikan opini, pandangan, serta kritik terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Aktivitas masyarakat di berbagai platform digital seperti X (Twitter), menghasilkan data dalam jumlah besar yang mengandung informasi berharga mengenai persepsi dan sentimen publik terhadap isu-isu terkini. Data tersebut dapat dimanfaatkan melalui pendekatan analisis sentimen untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai opini publik terhadap suatu kebijakan atau fenomena sosial tertentu.

Isu mengenai gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan topik yang kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap menyangkut keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta citra wakil rakyat di mata masyarakat. Dalam konteks era digital, media sosial menjadi ruang utama bagi publik untuk mengekspresikan pandangan dan berbagi informasi terkait isu ini [2]. Aktivitas tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar yang berpotensi dianalisis secara komputasional guna memahami sentimen masyarakat terhadap kebijakan publik, termasuk mengenai gaji dan tunjangan DPR RI.

Masyarakat menilai gaji DPR RI terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat, sementara sebagian lainnya menganggap jumlah tersebut wajar mengingat tanggung jawab besar yang diemban oleh wakil

rakyat. Perbedaan pandangan inilah yang menimbulkan variasi pandangan yang bersifat positif, negatif, dan netral di media sosial. Kontroversi yang meletus pada Agustus 2025 mengenai usulan kenaikan tunjangan anggota DPR RI menjadi titik kritis yang membawa konsep- konsep teoretis ini ke dalam konteks praktis. Usulan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi setiap anggota DPR RI muncul di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, di mana banyak warga berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Peristiwa ini menjadi studi kasus yang menggambarkan fenomena “resesi etik”, yaitu kondisi ketika elite legislatif gagal menunjukkan kepekaan dan etika publik sehingga memicu krisis legitimasi bagi lembaga demokrasi [3].

Gaji anggota DPR RI merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan oleh negara kepada pejabat legislatif atas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dijalankan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Gaji ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diatur melalui peraturan perundang-undangan, antara lain Pengaturan terkait penghasilan pimpinan dan anggota lembaga tertinggi maupun tinggi negara mencakup gaji pokok berdasarkan PP RI Nomor 75 Tahun 2000 serta tunjangan jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu menunjukkan bahwa analisis sentimen dapat digunakan untuk memahami opini publik terhadap isu sosial maupun politik.

[4] dalam penelitiannya berjudul “Analisis Sentimen Pengguna Media Sosial Twitter Terhadap Wabah Covid-19 Dengan Metode *Naive bayes Classifier* dan *Support Vector Machine*” mencapai tingkat akurasi klasifikasi 78,3%, dan tingkat akurasi yang dihasilkan oleh metode SVM adalah 81,6%. Sementara itu, [5] yang berjudul Analisis sentimen masyarakat terhadap perekrutan PPPK pada Twitter menggunakan metode *Naïve Bayes* dan *Support Vector Machine*, dalam penelitiannya dengan metode SVM menunjukkan nilai akurasi sebesar 94,80 %, dan Metode *Naïve bayes*

menunjukkan nilai akurasi sebesar 96,14 %. Selanjutnya [6] yang berjudul Perbandingan algoritma SVM dan *Naïve Bayes* dalam analisis sentimen Twitter pada penggunaan Mobil Listrik di Indonesia memperoleh nilai akurasi hasil implementasi klasifikasi yang diperoleh menggunakan algoritma *Naive bayes* adalah 63,02%, sedangkan akurasi dari algoritma *Support Vector Machine* adalah 70,82%.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Metode Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) dalam Analisis Sentimen Opini Publik Mengenai Gaji Anggota DPR RI di Media Sosial.”** Penelitian ini ditargetkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif mengenai persepsi publik terhadap isu gaji anggota DPR RI, serta bagaimana opini masyarakat terbentuk dan tersebar melalui media sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis sentimen terhadap opini publik mengenai gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diperoleh dari media sosial.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di tetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil sentimen terhadap opini publik mengenai gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diperoleh dari media sosial.

1.3 Batasan Masalah

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari media

sosial X (misalnya Twitter/X) yang memuat opini publik mengenai isu gaji atau tunjangan anggota DPR RI.

2. Data yang diambil berupa teks atau komentar yang mengandung opini atau sentimen publik, dengan rentang waktu pengambilan data yang telah ditentukan oleh peneliti (Agustus–Oktober 2025).
3. Penelitian ini hanya membahas dan membandingkan dua metode machine learning, yaitu *Naive bayes* dan *Support Vector Machine* (SVM).
4. Proses ekstraksi fitur teks dilakukan menggunakan metode TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) sebagai representasi data teks ke dalam bentuk numerik.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Membantu pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga legislatif, dan peneliti sosial, dalam memahami sentimen masyarakat terhadap isu gaji anggota DPR RI di media sosial.
2. Membantu masyarakat dalam melihat, menilai, dan memahami berbagai opini publik yang berkembang terkait kebijakan gaji anggota DPR RI, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap isu- isu sosial dan politik.

1.5 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian, isu yang dianalisis, sasaran penelitian, serta dampak positif yang diharapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfungsi untuk mengkaji literatur, teori, konsep, dan temuan dari

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan landasan teoretis serta mendukung argumen dan analisis dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan bagaimana riset dilakukan, termasuk pendekatan, desain, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis data hingga pengujian data menggunakan *Google COLAB*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan keluaran pengolahan data menggunakan *Google Colab*, kemudian menguraikan serta menafsirkan hasil yang diperoleh. Bagian ini sangat penting karena menghubungkan data yang diperoleh dengan teori dan hipotesis yang telah disusun sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup menyajikan ringkasan keseluruhan penelitian serta memberikan masukan berdasarkan temuan penelitian. Bab ini bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menawarkan rekomendasi atau langkah selanjutnya yang mungkin diperlukan .